



## **OPTIMALISASI BONUS DEMOGRAFI SEBAGAI PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI KASUS PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Sri Ayu Ningsi, Irsyad Lubis**

Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara

### **Abstrak**

Indonesia di proyeksikan menghadapi bonus demografi pada periode 2020 - 2035. Di Sumatera Utara tren ini sudah mulai terlihat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mengoptimalkan bonus demografi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data studi pustaka serta penelitian sebelumnya yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa untuk mengoptimalkan bonus demografi dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM, layanan kesehatan dan akses layanan publik. Supaya dapat sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi terutama sektor pengelolaan sektor ekonomi kreatif dan digitalisasi.

**Kata Kunci:** Bonus Demografi, Deskriptif Kualitatif, Pertumbuhan Ekonomi.

### **PENDAHULUAN**

Sumatera Utara adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Faktanya, tantangan dalam memaksimalkan potensi bonus demografi masih sangat kompleks. Bonus demografi merupakan situasi dimana persentase penduduk dalam kategori usia produktif (15-64 tahun) lebih tinggi dibandingkan dengan

penduduk yang berada dalam kategori usia non-produktif (0-14 tahun dan di atas 65 tahun). Data jumlah penduduk menurut kelompok umur sangat penting dalam menghitung beban rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*).

**Tabel 1. Data Pergeseran Jumlah Penduduk Sumatera Utara Berdasarkan Kelompok Umur (%) dan *Depedency Ratio* (%)**

| Kelompok Umur | 2005  | 2010  | 2015  | 2020  | 2024* |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0 - 14 tahun  | 33,68 | 33,33 | 33,51 | 26,85 | 26,60 |
| 15 - 65 tahun | 62,97 | 64,19 | 64,07 | 70,35 | 67,27 |
| > 65 tahun    | 3,35  | 2,48  | 2,42  | 9,57  | 6,13  |
| DR            | 58,80 | 58,20 | 60,30 | 51,83 | 48,65 |

Sumber data: BPS (Badan Pusat Statistik)

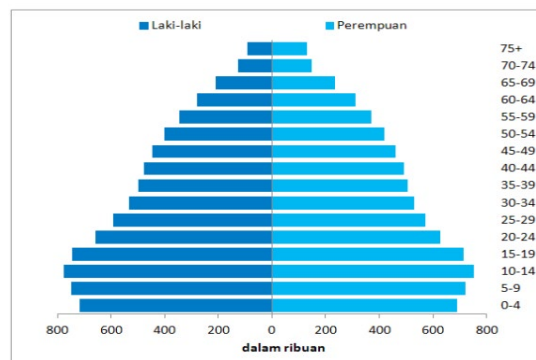
Tabel 1 menggambarkan pergeseran jumlah penduduk menurut kelompok umur dan *depedency ratio* (DR) mulai dari tahun 2005 s.d 2024. Transisi pertumbuhan usia produktif terbesar pada tahun 2020 peningkatan usia produktif sebesar 6,28

persen dibandingkan tahun 2015. kemudian usia lansia juga meningkat yang menambah beban ketergantungan dengan *depedency ratio* sebesar 51,83 artinya dari 100 orang usia produktif menanggung 51,83 orang usia non produktif yang didominasi oleh kelompok usia lanjut.

Fenomena bonus demografi dapat berfungsi sebagai pengerak pertumbuhan ekonomi akibat surplus usia produktif. Akan tetapi, tanpa kebijakan yang tepat, bonus demografi hanya akan menjadi angka statistik yang tidak memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, bonus demografi hanya menjadi beban bagi negara. Maka dari itu, perlu ada strategi agar bonus demografi tidak sekadar menjadi beban, tetapi dapat diubah menjadi peluang di masa depan. Kebijakan yang sesuai seperti memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan produktivitas, memperluas pasar tenaga kerja, serta memerlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada, untuk meningkatkan

produktivitas demi mencapai pertumbuhan ekonomi.

**Gambar 1. Piramida Penduduk Sumatera Utara Tahun 2025**



Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik)

Dinamika Bonus Demografi Provinsi Sumatera Utara saat ini jumlah penduduk juni 2024 sebesar 15,47 juta jiwa dan yang berada dalam usia produktif sebesar 67,27 persen. Dengan tingkat kemiskinan sebesar 7,19 Persen pada September 2024 dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 Persen (2024). Rasio gini per september 2024 sebesar 0,306, artinya **pendapatan atau pengeluaran di Sumatera Utara relatif lebih seimbang. Indikator keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan penduduk maupun antar wilayah.**

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara menunjukkan bahwa pada bulan Agustus 2024, jumlah angkatan kerja di provinsi ini mencapai 8,18 juta orang, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 71,2 persen. Dari total itu, sekitar 7,72 juta orang sudah memiliki pekerjaan, tetapi hanya 42,65 persen dari mereka yang bekerja di sektor formal. Tingkat pengangguran terbuka tetap berada pada angka 5,60 persen, walaupun menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun lalu. Data tersebut menunjukkan adanya potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Menurut Kementerian PPN/Bappenas (2019), untuk mengoptimalkan bonus demografi yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, ditekankan perlunya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki daya saing. Konsep pembangunan SDM dalam RT RPJMN 2020-2024 disusun berdasar tiga pilar, yaitu:

1) Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial mencakup pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, kualitas anak, perempuan, serta pemuda, pengurangan kemiskinan, dan pengelolaan populasi.

2) Produktivitas meliputi pendidikan dan pelatihan keterampilan, pendidikan universitas, ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi, serta pencapaian dalam olahraga.

3) Pengembangan Karakter meliputi revolusi mental dan penguatan ideologi Pancasila, pengembangan dan pelestarian budaya, memperkuat moderasi dalam beragama, serta budaya literasi, inovasi, dan kreasi.

Supaya bonus demografi ini dapat berfungsi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, dibutuhkan strategi jangka panjang yang memperhatikan aspek-aspek fundamental, seperti peningkatan mutu pendidikan, pelatihan keterampilan kerja, pembukaan lebih banyak lapangan kerja formal, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berbasis padat karya. Dengan cara ini, bonus demografi dapat diubah menjadi kekuatan yang nyata untuk mendorong kesejahteraan dan kemajuan daerah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Bonus demografi mengacu pada situasi di mana jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah usia non-produktif (0–14 tahun dan >65 tahun).

Fenomena ini membuka kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan adanya lapangan pekerjaan (UNFPA, 2021).

Bappenas (2020) memperkirakan Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi antara tahun 2020 hingga 2035. Di Sumatera Utara (sumut) perkembangan ini sudah mulai tampak. Menurut data BPS tahun 2024, sekitar 67,27 persen populasi provinsi Sumut berada dalam kategori usia produktif, yang merupakan peluang signifikan, tetapi masih menghadapi tantangan ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan ketersediaan pekerjaan yang sesuai, khususnya di sektor formal dan sektor strategis lainnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa dari waktu ke waktu (Todaro & Smith, 2015). Menurut Schumpeter, Pertumbuhan ekonomi adalah penambahan output (pendapatan nasional) disebabkan oleh penambahan alami dari pertumbuhan jumlah penduduk dan tingkat tabungan.

Dalam lingkup daerah, pertumbuhan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, efisiensi, penanaman modal, dan kreatifitas. Potensi ini dapat memacu pertumbuhan jika tenaga kerja yang produktif dimanfaatkan dengan baik (Barro, 1991).

Negara yang sukses mengubah Bonus demografi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi adalah Singapura, melalui investasi besar-besaran di bidang pendidikan dan pelatihan kerja. Pada tahun 2000, 81% dari populasi usia produktif dengan total penduduk Singapura mencapai 4,03 juta jiwa. Singapura berhasil memanfaatkan bonus demografi ini untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui berbagai kebijakan, seperti *Skills*

*Future, Adapt and Grow* serta subsidi layanan kesehatan, yang menekankan pada peningkatan kualitas SDM dan keterampilan tenaga kerja. Oleh karena itu, investasi pada pendidikan dan pelatihan kerja menjadi faktor penting dalam memanfaatkan struktur usia populasi yang menguntungkan.

Paul Romer (1990) yang dikenal dengan teori pertumbuhan endogen mengemukakan bahwa akumulasi pengetahuan teknis (teknologi) serta investasi pemerintah dalam penelitian mendorong pertumbuhan jangka panjang karena sifat kumulatif dan non-rival dari ilmu pengetahuan. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat dicapai jika negara secara proaktif berinvestasi dalam pendidikan, teknologi, dan penelitian, karena elemen-elemen tersebut mendorong produktivitas dan inovasi dari dalam sistem perekonomian itu sendiri.

Bappeda Sumatera Utara (2023) juga mencatat bahwa meskipun telah ada beberapa kebijakan yang mendukung industri dan penciptaan lapangan kerja, masih terdapat perbedaan antara kota-kota besar dan daerah pedesaan. Ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang berlaku harus disesuaikan dengan situasi setempat supaya efeknya lebih seimbang.

### **Penelitian Terdahulu**

Dalam kajian literatur, penelitian sebelumnya penting sebagai referensi untuk membantu peneliti dalam menerapkan penelitiannya serta mencegah kesamaan dengan penelitian yang telah ada.

1) Penelitian oleh Wina Desi Purwanti dan Panji Kusuma Prasetyanto (2022) berjudul, "Analisis Dampak Bonus Demografi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia". Studi ini memanfaatkan data *time series* dari 1990 hingga 2020 dengan model analisis ARDL (*Autoregressive*

*Distributed Lag*). Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk, dan Rasio Ketergantungan (*Depedency Ratio*) secara kolektif berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. IPM, Jumlah Penduduk, dan Rasio Ketergantungan berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi.

2) Penelitian Calvin Edo (2015) berjudul "Rekomendasi Kebijakan untuk Optimalisasi Bonus Demografi di Indonesia", menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Mengusulkan beberapa kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan bonus demografi dengan cara mengendalikan pertumbuhan penduduk agar angka rasio ketergantungan tidak bertambah. Sebab jika itu terjadi, kesempatan untuk meraih bonus demografi akan lenyap. Kualitas kesehatan dan pendidikan juga sangat krusial untuk meningkatkan mutu SDM. Karena kualitas sumber daya manusia memiliki hubungan positif dengan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, distribusi penduduk dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa untuk mengurangi konsentrasi penduduk usia kerja di Pulau Jawa.

3) Penelitian yang dilakukan oleh Satyahadewi, N., Amir, A., & Hendrianto, E. (2023) berjudul "Proyeksi Peningkatan Perekonomian melalui Pemanfaatan Bonus Demografi 2040" ini menerapkan metode Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini menyatakan bahwa bonus demografi memberikan kesempatan yang berharga, tetapi perkembangan teknologi, khususnya dalam kecerdasan buatan, berdampak signifikan pada struktur pasar kerja. Krusial untuk melakukan langkah strategis dalam memanfaatkan potensi bonus demografi ini. Pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, Kerja sama

yang kuat antara industri dan pendidikan akan menjamin bahwa lulusan memperoleh keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis secara mendalam bagaimana potensi bonus demografi di Sumatera Utara dapat dioptimalkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat kompleks dan menyangkut berbagai aspek sosial, ekonomi dan kebijakan publik, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan perlu dipahami melalui kajian study pustaka dan berdasarkan kajian hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Penelitian ini dilakukan melalui kajian dokumen perencanaan pembangunan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Sumatera Utara menghadapi dan memanfaatkan bonus demografi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan analisis dokumen yang relevan, ditemukan sejumlah hal penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan bonus demografi yaitu dengan pendekatan menyeluruh yang melibatkan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan kebijakan sosial. Dengan pendekatan yang sesuai, bonus demografi bisa menjadi kesempatan signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut penelitian sebelumnya menegaskan keberhasilan pengelolaan bonus demografi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pendidikan, dan sektor swasta.

#### **Kondisi Demografi di Sumatera Utara**

Penduduk merupakan sumber daya dan Individu yang menggunakan manfaat dari hasil pembangunan. Populasi yang besar dan berkualitas dapat menjadi modal pembangunan yang kuat untuk suatu daerah. Sumatera Utara berada pada fase bonus demografi yang signifikan, karena lebih dari 67,27 persen penduduk berada dalam kelompok usia produktif yaitu usia 15-64 tahun, yang dikenal sebagai kelompok usia produktif.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, total penduduk usia kerja di Sumatera Utara pada Agustus 2024 mencapai 11.464 ribu jiwa, meningkat sekitar 175 ribu jiwa dibandingkan dengan Agustus 2023 yang berjumlah 11.289 ribu jiwa. Terdiri dari tenaga kerja sejumlah 8.181 ribu jiwa, dengan jumlah penduduk yang bekerja mencapai 7.723 ribu jiwa dan jumlah pengangguran sebanyak 473 ribu jiwa pada Agustus 2024.

Berdasarkan Lapangan Kerja yang dominan menyerap tenaga kerja di Sumut.

1. Sektor Pertanian, kehutanan dan perkebunan telah menyerap tenaga kerja sebesar 2.562 ribu jiwa (33,18 persen).
2. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 1.533 ribu jiwa (19,85 persen).
3. Sektor Industri Pengolahan sebesar 706 ribu jiwa (9,14 persen).
4. Sektor Real Estate paling sedikit menyerap tenaga kerja yaitu hanya sebesar 10 ribu jiwa (0,12 persen).

Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk usia produktif membuka

peluang besar, karena kelompok usia produktif adalah fondasi ekonomi daerah. Akan tetapi, tantangan terbesar yang dihadapi adalah kualitas tenaga kerja yang tidak sejalan dengan kebutuhan pasar.

### **Tantangan dalam memanfaatkan bonus demografi.**

Bonus demografi di Sumatera Utara memiliki peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Akan tetapi, masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar seperti rendahnya Kualitas SDM (pendidikan dan keterampilan), tingginya angka stunting dan kesehatan, tingginya tingkat pengangguran, serta terbatasnya infrastruktur dan akses layanan publik.

#### **a. Tantangan Pendidikan dan Keterampilan**

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kualitas pendidikan dan lembaga pelatihan yang masih terbatas di Sumatera Utara. Terutama masalah disparitas akses dan kualitas antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Kurikulum pembelajaran di sejumlah sekolah masih belum sepenuhnya beradaptasi dengan kemajuan dunia kerja yang semakin bersaing dan berbasis teknologi. Banyak lulusan perguruan tinggi yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan karena kurangnya keterampilan yang sesuai dengan permintaan industri.

Perkembangan pesat teknologi, Kehadiran Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) dan revolusi industri 4.0 mengakibatkan adanya pergeseran ke era digitalisasi yang memerlukan kompetensi baru, seperti literasi digital, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Apabila tidak dipersiapkan sejak awal, sebagian besar tenaga kerja akan tertinggal dan susah beradaptasi dengan permintaan pasar kerja.

Pendidikan formal belum memadai untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil. Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, diperlukan pelatihan vokasional serta program sertifikasi kompetensi kerja. Namun, di Sumut, kesempatan untuk mendapatkan pelatihan kerja yang relevan dan berbasis industri masih terbatas. Balai Latihan Kerja (BLK) belum terdistribusi secara merata dan belum mampu menampung seluruh kebutuhan pelatihan tenaga kerja di berbagai daerah kabupaten/kota.

Apabila tantangan dalam pendidikan dan keterampilan dapat diatasi, provinsi Sumatera Utara akan mendapatkan manfaat besar dari bonus demografi. Tenaga kerja yang berpendidikan dan memiliki keterampilan tinggi dapat menghasilkan nilai tambah yang signifikan, baik sebagai pekerja maupun pengusaha. Dalam konteks ini, akan mendorong peningkatan produktivitas nasional, membuka peluang kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

#### **b. Kualitas Layanan Kesehatan dan Tingginya Angka Stunting**

Pengembangan akses layanan kesehatan memerlukan intervensi pemerintah, baik yang bersifat pusat maupun daerah, berupa regulasi dan penyediaan fasilitas pelayanan publik. Sebab dalam jangka panjang peningkatan kualitas kesehatan akan mempengaruhi produktivitas. Indikator Indeks Kesehatan provinsi Sumut menunjukkan arah perbaikan, meskipun tetap lambat. Oleh sebab itu, peningkatan dan optimalisasi layanan kesehatan menjadi fokus yang utama dan prioritas.

Stunting merupakan keadaan terhambatnya pertumbuhan anak disebabkan oleh kekurangan gizi yang berkepanjangan, terutama dalam 1.000 hari awal kehidupan. Berdasarkan

informasi dari pemerintah, walaupun tingkat stunting nasional telah turun dalam beberapa tahun terakhir, prevalensinya tetap cukup tinggi. Sasaran prevalensi stunting menurut WHO adalah kurang dari 20 persen. Anak yang mengalami stunting tidak hanya menghadapi masalah fisik, tetapi juga penurunan kemampuan kognitif dan produktivitas di kemudian hari. Hal ini berpengaruh langsung terhadap mutu tenaga kerja di masa mendatang.

Pemerintah Provinsi Sumut telah berhasil mengurangi prevalensi stunting sebesar 2,2 persen di tahun 2023 menjadi 18,9 persen melalui berbagai intervensi yang dilaksanakan. Pada tahun 2025, Pemprov Sumut akan memfokuskan anggaran untuk mengurangi angka stunting, serta memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan data yang tepat. Berdasarkan data IKPS Provinsi Sumut tergolong dalam kategori tingkat stunting sedang.

Menurut Sekretaris Umum BKKBN Tavip Agus Rayanto, terdapat empat langkah yang dapat diambil untuk mengurangi prevalensi stunting.

- 1) Pemanfaatan pemusatan data dan penggunaan teknologi.
- 2) Memusatkan perhatian pada ibu hamil, mengaktifkan Posyandu, dan meningkatkan perhatian terhadap baduta (bayi usia dua tahun) serta balita.
- 3) Kebersihan lingkungan dan air bersih.
- 4) Memilih sasaran intervensi jika terhambat oleh kendala anggaran.

#### **c. Tingginya Angka Pengangguran**

Menurut BPS 2024, angka pengangguran terbuka di Sumatera Utara sebesar 6,2%, dengan tingkat pengangguran tertinggi ditemukan pada

pemuda yang berusia 15-24 tahun mencapai 18%. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak tenaga kerja dalam rentang usia produktif, tidak semuanya dapat terserap ke dalam sektor industri atau pasar kerja. Setiap tahun, sekitar 3,45 juta alumni baru dari perguruan tinggi dan SMA/SMK di Indonesia memasuki dunia kerja. Akan tetapi, kesempatan kerja yang ada belum sanggup menampung seluruh tenaga kerja tersebut, sehingga menyebabkan tingginya tingkat pengangguran terdidik.

Tingginya tingkat pengangguran, terutama di kalangan pemuda, merupakan tantangan berat dalam mengoptimalkan potensi bonus demografi. Namun, dengan pendekatan yang sesuai, seperti revitalisasi pendidikan vokasi, pengembangan pelatihan keterampilan digital, penciptaan lapangan kerja melalui investasi dan kewirausahaan, serta peningkatan akses dan kualitas pendidikan, Indonesia dapat menghadapi tantangan ini. Oleh karena itu, bonus demografi bisa menjadi kesempatan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meraih Indonesia Emas 2045.

#### **d. Keterbatasan Infrastruktur dan Akses Layanan Publik**

Keterbatasan APBD dalam mendanai pembangunan infrastruktur mengakibatkan adanya kesenjangan pendanaan (*funding gap*) yang perlu ditutupi. Pemerintah diharuskan untuk memanfaatkan beberapa opsi pendanaan dengan melibatkan sektor swasta sebagai *Public Private Partnership* (PPP). PPP adalah suatu bentuk kesepakatan antara sektor publik (Pemerintah) dan sektor privat (Swasta) untuk menyediakan sarana layanan publik yang terikat oleh perjanjian, yang terbagi ke dalam beberapa jenis

tergantung pada kontrak dan distribusi risiko.

Keterbatasan infrastruktur dan layanan publik di wilayah terpencil dapat menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Kondisi ini memperparah ketimpangan antar wilayah dan menurunkan efektivitas dari program-program pembangunan. Oleh karena itu, intervensi pemerintah diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar seperti layanan publik, transportasi, dan perumahan. Pembangunan kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah-wilayah yang berpotensi.

### **Optimalisasi Bonus Demografi sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi**

Bonus demografi menciptakan kesempatan besar bagi Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Akan tetapi, kesempatan ini tidak secara otomatis memberikan keuntungan. Keuntungannya akan didapatkan jika dikelola dengan strategi yang benar. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dan terencana agar bonus demografi dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut langkah-langkah yang direkomendasikan peneliti untuk dilaksanakan, yaitu:

#### **a. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan**

Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah memperbaiki kualitas pendidikan, khususnya pendidikan yang berfokus pada keterampilan dan permintaan pasar kerja. Pendidikan formal perlu diarahkan untuk menciptakan generasi yang tidak hanya pandai secara akademis, tetapi juga terampil, kreatif, dan fleksibel.

Program pelatihan vokasional dan peningkatan keterampilan kerja seperti *upskilling* dan *reskilling* perlu

diperluas dan disesuaikan dengan kemajuan teknologi serta permintaan industri ke depan. Kurikulum pendidikan perlu mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan kewirausahaan.

#### **b. Penciptaan Lapangan Kerja yang Inklusif dan Berkelanjutan**

Bonus demografi akan menjadi tantangan jika jumlah tenaga kerja yang banyak tidak dapat diterima di pasar kerja. Dengan demikian, penciptaan pekerjaan menjadi faktor penting utama. Pemerintah harus mendorong investasi di sektor padat karya seperti manufaktur, agribisnis, pariwisata, serta industri kreatif. Selain itu, dukungan untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu diperkuat, sebab sektor ini terbukti mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar. Digitalisasi UMKM serta penyediaan akses pembiayaan yang sederhana juga dapat mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas ekonomi.

#### **c. Peningkatan Layanan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat**

Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat akan lebih efisien dan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap kemajuan. Oleh sebab itu, strategi krusial lainnya adalah memastikan mutu layanan kesehatan masyarakat. Pemerintah perlu terus berupaya untuk menurunkan angka *stunting*, meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya bagi anak, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi tenaga kerja yang sehat, cerdas, dan produktif, serta memperluas layanan kesehatan dasar, terutama di wilayah terpencil. Selain itu, sangat krusial untuk memperluas cakupan jaminan sosial dan ketenagakerjaan sehingga tenaga kerja merasa aman dan terlindungi saat bekerja.



#### **d. Penggunaan Teknologi dan Inovasi**

Pemanfaatan teknologi digital digunakan untuk menghadapi bonus demografi saat ini. Teknologi bisa berfungsi sebagai penghubung untuk mengurangi kesenjangan dalam akses informasi, pendidikan, dan kesempatan kerja. Pemerintah dan sektor swasta bisa menciptakan platform pelatihan online, pencarian kerja, serta program pendidikan berbasis teknologi untuk menjangkau masyarakat dengan lebih luas. Menggalakkan generasi muda untuk berperan dalam ekonomi digital dan inovasi teknologi juga krusial agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar, tetapi juga dapat menjadi produsen teknologi.

#### **e. Kolaborasi Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat**

Upaya optimalisasi bonus demografi tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Perlu adanya kerja sama yang kuat antara sektor swasta, institusi pendidikan, lembaga keuangan, dan masyarakat. Dunia usaha harus terlibat dalam pengembangan kurikulum pendidikan, pelatihan tenaga kerja, serta penyediaan peluang magang dan kerja. Lembaga keuangan bisa mendukung pendanaan bagi wirausaha muda, sementara masyarakat harus menciptakan budaya kerja keras, inovatif, dan responsif terhadap perubahan.

### **KESIMPULAN**

1. Sumatera Utara memiliki peluang bonus demografi, tetapi tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan sektor industri.

2. Pemprov Sumut dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang

inklusif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan tenaga kerja yang produktif melalui peningkatan pendidikan, kesempatan kerja, kesehatan, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor.

3. Penelitian ini menyarankan perombakan pendidikan vokasi, peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan infrastruktur digital demi mendukung transformasi ekonomi yang berbasis teknologi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Bappelitbang Provinsi Sumatera utara (2025). Rantekno RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

Bappenas (2017). Laporan Proyeksi Bonus Demografi Indonesia 2020–2035. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bappeda Sumatera Utara (2023). Rencana Pembangunan Daerah Sumatera Utara 2023–2028. Medan: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Barro, R. (1991). Economic Growth in a Cross Section of Countries. *Quarterly Journal of Economics*.

BPS (2023). Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

BPS Pemrov Sumut (2025). Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2025. Medan: BPS Provinsi Sumatera Utara.

Edo, Calvin (2015). Rekomendasi Kebijakan untuk Optimalisasi Bonus Demografi di Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*. Th VII. Nomor 2.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (2023). Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 22024-2026.

Purwati, W. D., & Prasetyanto, P. K. (2022). Analisis Pengaruh Bonus Demografi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *JURNAL ECONOMINA*, 1(3)

Putong, Iskandar dan Nuring Dyah Andjaswati (2010). Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta: Mitra Wacana Media

Romer, P. M. (1990). "Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98(5), S71-S102.

Satyahadewi, N., Amir, A., & Hendrianto, E. (2023). Proyeksi Peningkatan Perekonomian melalui Pemanfaatan Bonus Demografi 2040. Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora, 6(2)

Sirojuzilam dan Saiful Bahri (2014). Pembangunan Ekonomi Wilayah Sumatera Utara. Medan: USU Press

Todaro, M.P. & Smith, S.C. (2015). *Economic Development*.

Umar, Muhammad Agus (2017). Bonus Demografi sebagai Peluang dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Era Otonomi Daerah. e-journal Genta Mulia, 90-99.